

ASEAN, INDONESIA, DAN PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT-CHINA

Humphrey Wangke

7

Abstrak

Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China telah menimbulkan ketidakpastian dan dampaknya bukan hanya dirasakan oleh kedua negara tetapi juga negara-negara lainnya yang menjadi mitra dagang mereka. Pemberlakuan tarif dan hambatan perdagangan secara sepihak menimbulkan semangat proteksionisme dan telah memengaruhi rasa saling percaya di antara negara-negara. Oleh Karena itu banyak negara yang memilih untuk mempertahankan multilateralisme dengan mengedepankan kerja sama daripada memilih salah satu kekuatan. Survei ASEAN Studies Center menunjukkan, ASEAN tidak perlu berpihak dalam perang dagang ini mengingat ASEAN telah menjadi mitra utama AS dan China. Indonesia yang tidak menghendaki ASEAN terpecah karena perang dagang berusaha memengaruhi kondisi ini dengan mengedepankan pendekatan dialogis. Menghadapi situasi ini, Pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati ketidakpastian global sebagai dampak dari perang dagang AS-China. Dampak perang dagang AS-China terhadap tatanan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sikap ASEAN, termasuk Indonesia, dalam persoalan ini coba dianalisis melalui kajian singkat ini.

Pendahuluan

Perang dagang merupakan istilah yang digunakan oleh media dan diulang-ulang oleh para politisi dan ekonom untuk tindakan Amerika Serikat (AS) yang telah menaikkan bea masuk impor terhadap produk manufaktur China dan beberapa negara lainnya dan mendapat reaksi balasan dari negara yang dituju. Tindakan terhadap China tersebut diambil karena AS menganggap negara itu telah membahayakan kepentingan nasional AS. Volume ekspor China

ke Amerika Serikat jauh melebihi proporsi impornya sehingga defisit perdagangan AS dengan China sejak tahun 2010 semakin meningkat.

Untuk mengurangi defisit perdagangan, sejak Juni 2018 Pemerintah AS melancarkan strategi menaikkan bea masuk impor, terutama terhadap China. Pada awal bulan Mei 2019 Pemerintah AS menaikkan kembali tarif atas impor komoditas China yang bernilai 200 miliar dolar AS dari 10% menjadi 25%. China merespons dengan



memberlakukan tarif impor baru per 1 Juni 2019 atas komoditas milik AS 60 miliar dolar AS. China juga sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pembelian produk pertanian dan pesawat Boeing dari AS.

Perang dagang ini memasuki babak baru ketika perusahaan Google dari AS memutuskan hubungan sistem androidnya dengan produsen ponsel China, Huawei sebagai respons terhadap larangan pemerintah. Larangan ini mempunyai dampak yang signifikan bagi pengguna produk Huawei. Ratusan juta pengguna ponsel Huawei tidak dapat lagi mengakses layanan eksklusif Google seperti *gmail*, *youtube*, *play stores*, dan *google maps*. Perusahaan suku cadang seluler AS, Lumentum, telah pula memutuskan untuk menghentikan pengiriman suku cadang ke Huawei. Intelijen AS meyakini Huawei didukung oleh pihak militer sehingga diduga memberikan layanan intelijen bagi Pemerintah China.

Sampai kapan kondisi perang dagang ini berlangsung masih sulit diprediksi karena sangat tergantung pada kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak. Semakin besar kerugiannya, semakin tinggi keinginan kedua belah pihak untuk berdamai. China mulai menyampaikan keluhannya karena tindakan AS telah merugikan kepentingan dan perusahaan China, dan menganggap perang dagang ini dapat diselesaikan melalui perundingan. Perang dagang juga telah membuat biaya dan harga barang produk China meningkat.

Tulisan ini akan menganalisis

dampak perang dagang AS-China terhadap tatanan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang selama ini telah menjadikan AS maupun China sebagai mitra dagang utama. Dalam kondisi AS dan China sedang terlibat dalam perang dagang, apa yang dapat dilakukan ASEAN?

Dampak Perang Dagang

China adalah mitra dagang AS terbesar dan begitu pula sebaliknya. China menguasai 21,6% pangsa impor AS. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding posisi AS yang hanya menguasai 8,4% pangsa impor China. Ekspor ke AS menghasilkan devisa sebesar 436 miliar dolar AS bagi China. Sebaliknya, ekspor ke China menghasilkan devisa sebesar 112 miliar dolar AS untuk AS. Sejak 2011, China telah melampaui AS sebagai produsen barang-barang manufaktur terbesar di dunia dan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional yang turut meningkatkan standar hidup masyarakat.

Perang dagang ini berlangsung secara berhadap-hadapan (*head to head*) sehingga sulit diharapkan dapat diselesaikan secara bilateral dalam waktu dekat, namun dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat dunia. Dampak tersebut antara lain nilai tukar mata uang sejumlah negara mulai tertekan, demikian pula dengan nilai saham. Kondisi perekonomian dunia akan terdampak oleh perang dagang yang pada akhirnya akan memengaruhi perekonomian domestik negara-negara di dunia.

Perang dagang antara AS dan China telah membahayakan

masa depan pertumbuhan ekonomi dan investasi negara-negara di dunia. Sekjen Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*), Angel Gurría mengingatkan bahwa perang dagang bukan hanya menghambat pemulihan, tetapi juga mendorong terjadinya pelambatan ekonomi dunia dalam waktu yang relatif singkat dan membuat konsumen harus merasakan kenaikan harga barang. Lembaga keuangan internasional seperti IMF mengakui perlunya menyelesaikan perang dagang antara AS dan China serta mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Pemberlakuan tarif dan hambatan perdagangan akan menimbulkan efek negatif. Semangat proteksionisme yang muncul dari perang dagang AS-China akan memengaruhi rasa saling percaya di antara negara-negara.

Dampak lain dari perang dagang adalah munculnya semangat proteksionisme dan unilateralisme di atas multilateralisme. Negara-negara besar dengan mudah akan menjatuhkan sanksi apabila kondisi perdagangan telah merugikan dan mengancam identitas mereka sebagai negara besar.

Sikap ASEAN

Dalam perundingan yang berlangsung di Washington tanggal 9-10 Mei 2019, kedua negara belum mencapai kesepakatan. Baik AS maupun China memberikan pandangan yang saling bertentangan. AS optimis perang dagang akan berakhir dengan kesepakatan, tetapi China justru memberi peringatan akan membalas jika AS tetap

melanjutkan rencana kenaikan tarif impor.

Dengan sikap kedua negara seperti itu, maka ada dua kemungkinan skenario penyelesaian yang muncul. Skenario terbaik adalah tercapainya kesepakatan sehingga perang dagang yang lebih besar lagi dapat dihindari. Presiden Trump pernah mengatakan situasi perang dagang akan diselesaikan melalui negosiasi. Skenario terburuk adalah terjadinya eskalasi perang dagang. Ini bisa terjadi jika kedua negara gagal mencapai kata sepakat. Perang dagang akan berlanjut dan mengubah perdagangan internasional ke fase 'new normal', yang akan memengaruhi hubungan bilateral AS-China.

Dua skenario bisa terjadi karena perang dagang yang berlangsung antara AS dan China oleh banyak pengamat dianggap sebagai bentuk baru perang dingin. Persaingan antara dua kekuatan besar ekonomi dunia ini oleh banyak pengamat hubungan internasional dianggap sebagai sebuah fenomena perebutan posisi sebagai negara adikuasa baru. Adu kekuatan tidak lagi terbatas pada sektor politik dan keamanan, namun sudah menjalar menjadi adu pengaruh ke sektor ekonomi dan perdagangan ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.

Buruknya, polarisasi kekuatan antara AS dan China diikuti dengan runtuhnya nilai-nilai multilateralisme yang dibangun negara-negara di dunia sejak akhir Perang Dunia II. AS yang semula sangat mengedepankan kerja sama multilateral dalam perkembangannya berubah menjadi negara proteksionisme melalui kebijakan "American First" selama kepemimpinan Donald Trump.

Kondisi ini mengakibatkan banyak negara mempertanyakan, apa sebenarnya esensi struktur kerja sama internasional yang dibangun Presiden Trump. Apakah semangat proteksionisme dilakukan karena perekonomian AS sudah ketinggalan dari China?

Selama ini banyak negara menilai, polarisasi terjadi karena dampak dari kebangkitan China secara ekonomi dan politik di panggung internasional. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena pada saat yang sama pengaruh orientasi perdagangan AS yang lebih mengisolasi diri dan mengedepankan kepentingan nasional mulai dirasakan oleh banyak negara. Komitmen AS seperti ini sudah mulai terlihat sejak masa Presiden George Bush Jr. yang menggelorakan kebijakan melawan terorisme dan mengalihkan fokus geopolitik ke Timur Tengah. Sempat ada harapan ketika Barack Obama memimpin dengan kebijakan '*Pivot to Asia*', namun saat Trump terpilih, kebijakan AS membingungkan sejumlah negara Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, melalui pernyataan pers tahunannya di awal tahun 2019 sempat menyinggung hal itu dengan menyatakan, konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan, bukan hanya bagi yang kalah, tetapi juga bagi yang menang. Pernyataan itu seolah menjadi sinyal bahwa Indonesia, sebagaimana banyak negara lain di dunia, memilih untuk mempertahankan nilai-nilai multilateralisme dengan mengedepankan kerja sama

daripada memilih salah satu kekuatan. Langkah sebagian besar negara untuk tidak memihak dilatarbelakangi oleh ketidakpastian kebijakan yang diperlihatkan oleh AS maupun China, meskipun secara struktural potensi memihak itu tetap ada.

Fenomena ketidakberpihakan dapat dicermati dari hasil survei terbaru yang memperlihatkan bahwa China dan AS merupakan dua kekuatan yang paling tidak bisa diprediksi. Hasil survei yang dirilis oleh ASEAN Studies Center di ISEAS Yusof-Ishak Institute berjudul "*The State of Southeast Asia: 2019 Survey Report*" memperlihatkan bahwa 68,2% responden memandang pendekatan AS di Asia Tenggara menurun atau tidak berlanjut selama kepemimpinan Trump. Survei dilakukan terhadap 1.008 responden dari kalangan pemerintah, akademisi, komunitas bisnis, kelompok sosial, dan komunitas media.

Demikian pula dengan pendekatan China melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI), ditanggapi oleh sekitar 70% responden yang menginginkan pemerintah berhati-hati terhadap BRI agar tidak terjebak utang dengan China. Hasil survei tersebut menunjukkan negara-negara Asia Tenggara cenderung bersikap hati-hati, tidak hanya terhadap China, tetapi juga terhadap rivalitas dua kekuatan besar di kawasan. Masyarakat Asia Tenggara atau ASEAN tidak ingin berpihak, namun menyadari bahwa kepentingan AS dan China di kawasan Asia Tenggara lebih pada benturan kepentingan daripada

persaingan.

Untuk jangka pendek, ASEAN sangat diuntungkan oleh perang dagang ini karena menjadi basis alternatif bagi perusahaan yang ingin merelokasi produknya jauh dari China agar terhindar dari tarif impor yang tinggi. Sepertiga dari 430 perusahaan AS yang beroperasi di China telah dan sedang mempertimbangkan pindah lokasi produksi dan mengembangkan bisnis di Asia Tenggara. Jika perang dagang antara AS dan China mengarah ke skenario kedua, maka tren relokasi ini akan semakin cepat mengingat Asia Tenggara berfungsi baik sebagai pasar pertumbuhan yang besar berkat biaya produksi yang lebih rendah dan liberalisasi perdagangan.

Penutup

Perang dagang AS-China terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam perdagangan internasional kedua negara. Penaikan tarif bea masuk yang dilakukan oleh AS merupakan salah satu upaya membendung derasnya arus produk manufaktur China memasuki pasar dalam negeri AS. Meskipun langkah protektif AS telah merusak nilai-nilai kerja sama internasional yang bersifat multilateral, namun tidak banyak negara yang ingin terlibat di dalamnya. ASEAN merupakan salah satu pihak yang menghindari keberpihakan dalam perang dagang ini dengan mengedepankan semangat dialog untuk mengakhiri ketidakjelasan sistem perdagangan internasional.

Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan karena

selama ini kebijakan luar negeri Indonesia sangat bergantung kepada kapabilitas negara tetangganya. Indonesia tentunya tidak menginginkan ASEAN terpecah belah oleh kepentingan AS ataupun China. Bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tantangan menghadapi dua kubu besar yang tengah bersaing bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu yang dilakukan Indonesia saat ini adalah mengedepankan dialog, baik dengan negara-negara ASEAN maupun dengan AS dan China sebagai upaya memengaruhi kondisi perang dagang ke arah yang lebih baik.

Menghadapi situasi seperti itu, Pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati periode ketidakpastian global yang meningkat akibat potensi rusaknya sistem dan mekanisme perdagangan internasional sebagai dampak dari perang dagang AS-China. Inisiatif baru diperlukan agar tidak menimbulkan dampak buruk di dalam negeri. Inisiatif baru ini antara lain mempercepat revisi Undang-Undang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Perdagangan, serta mereformasi WTO agar negara seperti Indonesia tidak mudah menjadi objek tindakan proteksionis dan diskriminatif negara-negara maju.

Referensi

- “Alun Dampak Perang Dagang”, Kompas, 10 Juni 2019, hal. 4.
- Ari Kuncoro, “Menyikapi Perang Dagang AS-China”, Kompas, 21 Mei 2019, hal. 1.
- “Asa di Tengah Ketegangan”, Bisnis Indonesia, 10 Mei 2019, hal. 5.

- “AS-China Picu Harapan”, Kompas, 15 April 2019, hal. 5.
- Asean Studies Center, *The State of Southeast Asia: 2019 Survey Report*, ISEAS Yusof-Ishak Institute, Singapura, hal. 16.
- “Beijing Lawan Tekanan AS”, Kompas, 24 Mei 2019, hal. 5.
- “China Tak Akan Menyerah”, Kompas, 11 Mei 2019, hal. 5.
- “Current account deficit no always bad thing: Analysts”, The Jakarta Post, 21 Mei 2019, hal. 1.
- “Daya Saing RI Membaik”, Kompas, 31 Mei 2019, hal. 18.
- “Kekuatan Huawei Tidak dapat Diremehkan”, Media Indonesia, 22 Mei 2019, hal. 22.
- “Ketidakpastian Dagang AS-Tiongkok Jadi Musuh Pertumbuhan”, Media Indonesia, 21 Mei 2019, hal. 21.
- “Misi Dagang Awal Tahun Salah Sasaran”, Bisnis Indonesia, 10 Mei 2019, hal. 22.
- “Mohamad Chatib Basri, Indonesia dan Perang Dagang”, Kompas, 7 Juni 2019, hal. 4.
- “Perang Dagang tak Membuat AS Hebat”, Media Indonesia, 3 Juni 2019, hal. 18.
- “Perlu Siasat Atasi Perang Dagang”, Media Indonesia, 20 Mei 2019, hal. 17.
- “Trade war: How US-China talks could play out”, The Jakarta Post, 9 Mei 2019, hal. 15.
- “Trump Desak Tiongkok Capai Kesepakatan”, Media Indonesia, 13 Mei 2019, hal. 22.
- “Tiongkok Sebut AS Teroris Ekonomi”, Media Indonesia, 31 Mei 2019, hal. 22.



Humphrey Wangke
humphrey.wangke@dpr.go.id.

Dr. Humphrey Wangke, M.Si, menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada Tahun 2018 berhasil menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim, editor, (Yayasan Obor, 2018); “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan”, editor (Yayasan Obor, 2017), “Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, Easy Kalimantan), (RJSSM, 2017), “The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership” (Atlantis Press, 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.